



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUNING NUGRAHANI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 930982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/23 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **372.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS-SS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, BYD ATTO 1 PREMIUM Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 238.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **90.350.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.299.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **23.249.520**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **3.537.398.520**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.537.398.520

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 888425

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	219.687.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 219.687.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	202.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.788.041
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	505.975.041
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	505.975.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENING KARTIKA SRI REJEKI S
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 487171

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NEW JUPITER MX 135 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 150 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
6. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.019.964

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.146.519.964



III. HUTANG

Rp. 13.493.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.133.026.364

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITIN PARLINA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 134585

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, XENIA 1.3 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.700.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 290.750.000

III. HUTANG Rp. 62.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 228.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ADE RACHMAT SANTOSA

NIK : 3174092006780003

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Sub Unit Kerja : BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 5 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Riwayat LHKPN

*Data harta hasil migrasi yang memiliki jenis mata uang US\$ dikonversi menjadi mata uang Rp. dengan nilai kurs 1 US\$ = Rp. 10.000,-

Tampilkan 10 baris/halaman

Cari:

No.	Nama PN / WL	Tanggal Lapor	Jenis Pelaporan	Jabatan	Status Laporan	Laporan Via	Aksi
1	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2025	Periodik	• PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Q _e)	Terverifikasi Lengkap Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
2	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2024	Periodik	• PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Q _e)	Diumumkan Lengkap Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
3	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2023	Periodik	• PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (Q _e)	Diumumkan Lengkap Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
4	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2022	Periodik	• PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (Q _e)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
5	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2021	Periodik	• PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (Q _e)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	    
6	ADE RACHMAT SANTOSA	31/12/2020	Periodik	• PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (Q _e)	Diumumkan Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	  